

MODEL DIFUSI INOVASI PADA PENERAPAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

Mgs. Ismail

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Indonesia

Email: mgs_ismail@ipdn.ac.id

ABSTRAK

KIA dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagianak, walaupun anak tersebut telah memiliki akta kelahiran dan atau tentunya memiliki kartu pelajar. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah untuk melindungi hak konstitusional anak sebagai warga Negara Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang mampu menggambarkan yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung dengan tujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan, menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Dengan pendekatan Teori Difusi Inovasi yang dalam gambarannya melihat dua sisi yaitu sisi karakteristik dan sisi elemen yang melekat pada inovasi itu sendiri. Sisi pertama yg terdiri dari 3 elemen tidak membuat masyarakat tergugah dan sisi kedua sama begitu juga tidak berjalan dengan baik

Kata Kunci: Model, Penerapan, Melindungi, KIA, Qualitative Descriptive.

ABSTRACT

The Child Identity Card (Kartu Identitas Anak/KIA) is considered an important instrument because, to date, there has been no official identity card specifically issued for children, despite the fact that they may already possess a birth certificate and/or a student identification card. The KIA serves to protect the constitutional rights of children as citizens of the Republic of Indonesia. This study employed a qualitative descriptive research method, which is designed to describe and explain phenomena occurring in the present or during the period of the research. The purpose of this method is to provide a comprehensive, detailed, and in-depth description of the object or subject under investigation, reflecting actual conditions as they exist at the time of the study. The research adopts the Diffusion of Innovation Theory as its analytical framework, which examines innovation from two perspectives: the characteristics of the adopters and the elements inherent in the innovation itself. The findings indicate that the first perspective, consisting of three key elements, has not been effective in encouraging public interest or participation. Similarly, the second perspective, which focuses on the characteristics of the innovation, has also failed to function effectively in supporting the implementation of the Child Identity Card program.

Keywords: Model, Implementation, Protection, Child Identity Card, Qualitative Descriptive.

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, pada Penjelasan Umum UU No. 35 Tahun 2014 ditegaskan bahwa, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam kelangsungan

sebuah bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan isu yang sangat penting karena pengalaman buruk pada masa anak memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kesehatan fisik, kesehatan mental, perkembangan kognitif, perilaku sosial, produktivitas, bahkan dapat diwariskan kepada

generasi berikutnya. Oleh sebab itu, perlindungan anak tidak hanya bertujuan melindungi hak individu anak, tetapi juga merupakan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan keberlanjutan suatu bangsa. Berikut adalah beberapa hasil penelitian dari jurnal bereputasi scopus/wos yang dapat memperkuat argumentasi bahwa perlindungan anak isu yang sangat penting atau red flag karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan dampak kekerasan atau pengabaian pada masa anak akan mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia dimasa akan datang.

Kim, B. (2025) dalam *Annual Research Review: Mapping the multifaceted approaches and impacts of adverse childhood experiences – an umbrella review of meta-analyses*. Journal of Child Psychology and Psychiatry (Q1) dengan temuan penelitiannya terhadap 99 meta-analisis menunjukkan bahwa pengalaman buruk pada masa anak (*Adverse Childhood Experiences/ACEs*) berdampak pada kesehatan fisik, kesehatan mental, perkembangan neurologis, perilaku sosial, hingga keterlibatan dalam kriminalitas pada masa dewasa. Dengan temuannya ini, dia menyimpulkan bahwa pengalaman buruk pada masa anak memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan individu sepanjang kehidupan. Oleh karena itu, perlindungan anak merupakan investasi strategis untuk mencegah berbagai masalah kesehatan, sosial, dan ekonomi di masa depan.

Penelitian oleh Oral et al. (2016) dalam *Pediatric Research* menegaskan bahwa pengalaman masa kecil yang merugikan (*ACEs*) memicu stres toksik yang mengakibatkan konsekuensi kesehatan fisik dan mental negatif dalam jangka pendek maupun panjang. Studi ini menekankan perlunya sistem perawatan kesehatan mengadopsi

pendekatan trauma-informed care untuk mencegah re-traumatisasi dan menangani dampak *ACEs* secara komprehensif.

Penelitian oleh Arnold et al. (2023) membuktikan bahwa pengalaman masa kecil yang buruk (*ACEs*) pada orang tua berdampak nyata secara antar generasi, di mana anak-anak mereka menghadapi risiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan, masalah mental, serta hambatan tumbuh kembang. Begitu juga dengan penelitian oleh Nicole Racine, N., et al. mengonfirmasi bahwa pengalaman masa kecil yang buruk (*ACEs*) pada orang tua berdampak nyata pada anak, meliputi masalah kesehatan mental, gangguan perilaku, serta kesulitan emosional. Penelitian ini memperlihatkan bahwa perlindungan anak akan menentukan kualitas generasi berikutnya.

Berdasarkan amanah regulasi negara Indonesia dan hasil penelitian internasional di atas Kartu Identitas Anak selanjutnya disebut KIA dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak, walaupun anak tersebut telah memiliki akta kelahiran dan atau tentunya memiliki kartu pelajar. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat program terkait identitas anak. Di satu sisi masyarakat mendukung pemerintah untuk menjalankan program pembuatan KIA. Masyarakat berharap KIA sesuai dengan tujuannya, yakni sebagai identifikasi anak. KIA pun memiliki kegunaan-kegunaan sejenis pemenuhan kelengkapan dokumen pendaftaran sekolah, kemigrasian, pelayanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit, keperluan klaim santunan kematian, dan pencegahan perdagangan anak dan itu merupakan hal yang melibatkan penyertaan KIA. Melalui KIA seharusnya pemerintah segera mewujudkan nomor identitas pribadi yang terintegrasi dengan gabungan data

dari berbagai macam institusi pemerintah dan swasta. Sehingga dengan diterbitkannya oleh pemerintah, maka akan mempermudah anak dalam memenuhi hak sebagai Warga Negara Indonesia.

Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya disebut Ditjen Dukcapil, Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd., kembali menggaris bawahi bahwa target capaian pelayanan Dukcapil tahun ini yaitu, 99,4% cakupan perekaman KTP-el, 50% kepemilikan KIA, 98% akta kelahiran, 75% Buku Pokok Pemakaman, Perjanjian Kerjasama (PKS) dan akses data dengan minimal 15 OPD, 2 inovasi per tahun, dan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) 25% dari total cakupan perekaman KTP-el.

Berdasarkan data pelaporan per 15 Maret 2023 daerah yang telah mencapai target nasional yaitu untuk perekaman KTP-el ada 4 Dinas Dukcapil di Provinsi Lampung, Sulsel, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta. Untuk kepemilikan KIA, 15 daerah mencapai target yaitu Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu, Babel, Lampung, Bali, Sumatera Barat, Kep. Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Kalimantan Utara, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Cakupan akta kelahiran target diraih 23 Disdukcapil, yakni Provinsi DKI Jakarta, Gorontalo, Bengkulu, Babel,

Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kep. Riau, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Timur, Riau, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Aceh.

Untuk penggunaan buku pokok pemakaman target dicapai 7 Disdukcapil: Provinsi DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Riau. Target PKS pemanfaatan data dicapai 3 daerah, yaitu Disdukcapil Daerah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Lampung dan akses data diperoleh 5 Disdukcapil: Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Barat. Teguh Menyampaikan pula IKD atau KTP digital adalah kebijakan nasional yang secara bertahap akan menggantikan KTP-el, sehingga seluruh Kepala Dinas Dukcapil harus mengupayakan tercapainya target 25% dari total perekaman.

Dari data diatas menunjukkan bahwa Jawa Barat belum termasuk salah satu dari 15 daerah yang telah mencapai target pencapaian 50% pencapaian kepemilikan KIA. Untuk provinsi Jawa Barat dalam hal peringkat kepemilikan KIA yang berdasarkan tingkat persentase antar kabupaten atau kota di Jawa Barat ditunjukan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Progres Data KIA Jawa Barat

No	Kab/Kota dan Provinsi	Jumlah	%
		5.892.800	42,93
1	Kota Cimahi	139,263	95,09
2	Kota Sukabumi	70,96	89,67
3	Majalengka	295,027	88,96
4	Kota Banjar	45,275	86,11
5	Kota Depok	387,139	74,73
6	Pangandaran	61303	64,8
7	Purwokarta	147,869	61,18
8	Kota Tasikmalaya	108703	59,45
9	Tasikmalaya	298,145	58,93

10	Kuningan	170,266	54,57
11	Kota Bandung	334,337	54,07
12	Karawang	348,487	53,91
13	Kota Bogor	147,597	53,14
14	Kota Cirebon	42,827	50,91
15	Indramayu	161,527	49,26
16	Cianjur	370,687	49,18
17	Bekasi	424,614	45,21
18	Sumedang	128,56	44,13
19	Kota Bekasi	277,097	41,81
20	Sukabumi	307,525	38,78
21	Subang	147,456	37,41
22	Bandung	383,652	35,98
23	Ciamis	106,593	35,05
24	Cirebon	182,991	30,46
25	Bogor	472,197	29,82
26	Bandung Barat	133,873	26,84
27	Garut	198,83	23,66

Sumber: BPS 2023

Berdasarkan tabel 1 diatas, dengan rendahnya persentase yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Oleh karena itu penelitian atau kajian ini dilakukan yang lebih mendalam dengan fokus pada analisis kepemilikan KIA.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Konsep penelitian kualitatif dikemukakan oleh banyak ahli, antara lain Jonker & Pennink (2009:72) menjelaskan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan memahami fenomena sosial melalui interpretasi terhadap makna yang diberikan oleh individu atau kelompok dalam konteks alamiahnya. Peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan interaksi sosial melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif.

Strauss & Corbin (2013:4), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk kuantifikasi

lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk memahami kehidupan, perilaku, fungsi organisasi, interaksi sosial, maupun hubungan antar manusia. Lalu Creswell (2010:4) menjelaskan bahwa, penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari individu atau kelompok mengenai suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini menekankan proses pengumpulan data di lingkungan alami, analisis data secara induktif, serta interpretasi makna oleh peneliti.

Dari ketiga konsep di atas menjelaskan bahwa kajian dari penelitian kualitatif adalah sejumlah individu atau sekelompok orang atau organisasi tertentu, untuk memahami makna dan fenomena yang terjadi dari sudut pandang semua pihak yang terlibat, dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisasi dalam mendapatkan informasi serta temuan yang dihasilkan bukan dalam bentuk hitungan atau statistik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang

mampu menggambarkan yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung dengan tujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan, menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Disamping itu metode ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang diteliti dengan mengumpulkan data, klasifikasi, analisis, kesimpulan dan laporan. Data-data yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, *mean* (rata-rata), dan perhitungan persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan KIA ditinjau dari Teori Difusi Inovasi

Penerapan KIA yang terus berlanjut seharusnya telah mencapai target yang diinginkan sesuai dengan jumlah anak yang berhak memiliki kartu ini. Hal ini untuk lebih mendalam tentang penerapannya maka penelitian ini berfokus di kabupaten Bogor akan ditinjau dengan teori Difusi Inovasi yang mana dalam bahasa Inggris (Everett, 1995:5) mengatakan, "Diffusion is the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system", dan juga (Everett, 1995:11) mengatakan tentang inovasi, *An innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual or other unit of adoption*. Selanjutnya sebagai elemen dari difusi dimaksud menurut (Everett, 1995:10) yaitu: *the four main elements in the diffusion of new ideas are: (1) the innovation, (2) communication channels, (3) time, and (4) the social system*. yang diterjemahkan empat unsur utama dalam difusi inovasi: (1) Inovasi; (2) saluran komunikasi; (3) waktu; dan (4) sistem sosial.

1. Inovasi

Inovasi merupakan gagasan, ide, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sesdikdukcapil) Kabupaten Bogor beliau mengatakan.

Untuk Kab. Bogor dalam pelayanan yang dilakukan oleh Dinas mengenai akte kelahiran sampai mencapai 300/hari, dan KTP 1000/hari (baik cetak, rekam, dan kemudian pergantian KTP). Kaitan dengan KIA, rata-rata 200/hari dicetak, kemudian akte kematian, pindah datang sangat padat pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil. Untuk KIA satu paket dengan masyarakat mengajukan permohonan akta kelahiran yang usianya masih dibawah 17 tahun langsung diproses KIA-nya. Ada pelayanan *Three in One* yaitu: Merubah dulu Kartu Keluarga (KK), ada penambahan anggota. Membuat akta kelahiran dan kemudian membuat 1 paket dengan KIA, sehingga masyarakat akan merasa senang pada saat mengajukan akta kelahiran.

Tidak memohon KIA tetap dibuatkan KIA-nya, karena ada istilah pelayanan *Three in One*, inilah yang kita sosialisasikan kepada masyarakat, kemudian dari pelayanan tadi baik akte/KIA tidak dipungut biaya (Gratis). Berdasarkan kebijakan-kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Terkait dengan Impola, kaitan dengan jumlah penduduk, penduduk di Bogor sekitar 5,6 juta jiwa, oleh karena itu dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat & pendekatan pelayanan kita ada 7 UPT yang membawahi rata-rata tiap UPT 5-6 kecamatan, jumlah kecamatan ada 40 lebih. UPT ini memberikan layanan berkaitan dengan KIA akte kelahiran dan lain sebagainya. UPT memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin untuk lebih efisiensi masyarakat dalam rangka

mengurus Adminduk di wilayah kabupaten Bogor.. Sekarang ada keseimbangan antara KIA dengan akta kelahiran, kalau dulu masyarakat belum mengenal dan tahu ada KIA, sekarang kita terus-terusan, sehingga ketika masyarakat datang ke kita baik ke UPT mau layanan Akte langsung oleh kita secara otomatis kita buat KIA nya. Pemerintah sudah memberikan kemudahan, tinggal kita gencar memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, identitas kependudukan itu sangat diperlukan minimal taraf ekonomi mereka sudah menikah."

Setelah wawancara dengan Sekdis dilanjut dengan tanggapan atau respon dari Kasubag Pelayanan Disdukcapil (Adie Kurniawan) mengatakan, "Untuk KIA mendorong sedikit kesulitan karena belum menjadi primadona." Beliau juga menambahkan bahwa, "Bogor tiap tahun trend jumlah penduduknya bertambah terus-menerus. Target KIA tahun ini ditargetkan 60%, sedangkan pencapaian sampai bulan maret ini 30,5%." Selain itu, beliau juga menginfokan bahwa, "... dan kita juga mencoba bekerjasama dengan beberapa instansi atau merchant lainnya agar bisa dimanfaatkan dan menarik, seperti di tahun 2019, sempat kita dapat potongan dari taman safari, tempat wisata, rumah makan, dan juga bekerjasama dengan bank jabar agar dijadikan sebagai dasar pembuatan rekening biar memacu anak-anak kecil."

Ada juga respon dari informan penelitian ini yaitu Bapak Hendra Kaunit UPT Ciawi yang mengatakan bahwa, "Terkait pelayanan KIA/Akte secara ketentuan nanti pada saat orang tuanya minta dibuatkan Akte langsung dibuatkan sepanjang persyaratan terpenuhi."

Dari masyarakat dalam pertemuan tim penelitian ini di tempat pelayanan di UPT Ciawi yang diwakili oleh Ibu Pratiwi sebagai Juru Bicara Masyarakat yang

sedang mengurus dokumen kependudukan mengatakan bahwa, "Saya punya KIA untuk anak saya yang saya buat sejak dia berumur 2 bulan dan sekarang anak saya sudah kelas 3 Sekolah Dasar (SD). Saya tidak pernah menggunakannya untuk registrasi masuk sekolah cukup akta kelahiran pada saat masuk sekolah dan sampai saat ini sudah hangus kali karena sudah lama tidak dipergunakan." Disamping ini ada salah satu ibu lain yang memberi tanggapan bahwa, "Saya tidak punya KIA dan itu apa dan digunakan untuk apa."

Dari respon-respon yang peneliti dapat bahwa menggambarkan ide baru atau inovasi yang di ciptakan oleh pemerintah dalam hal ini Ditjen Dukcapil belum terlalu mendasar penerimaannya dalam membangun kepemilikan.

2. Saluran komunikasi

Saluran komunikasi dalam difusi inovasi dapat dikatakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Suatu inovasi dapat diadopsi oleh seseorang jika inovasi yang diterimanya tersebut telah dikomunikasikan kepada orang lain. Saluran komunikasi disini harus disesuaikan dengan siapa yang dituju. Jika ditujukan kepada masyarakat luas maka saluran yang digunakan ialah komunikasi massal dan sebaliknya jika yang dituju adalah seorang individu maka yang digunakan adalah komunikasi personal

Pada penelitian ini dari hasil wawancara dengan Pak Iwan Setiawan (Staff Ahli UPT. Cileungsi) mengatakan, Untuk Sosialisasi terkait KIA kepada masyarakat, udah sering sekali memberikan materi & pembahasan agar masyarakat tersebut dapat mengerti apa itu KIA dan apa itu gunanya KIA, tapi hambatannya adalah tidak semua masyarakat dapat mengerti soal KIA (mungkin terkait umur, kegunaan dsb).

Dan dari masyarakat yang sebagai user dikatakan oleh Ibu Cici bahwa, Kami

tahu pada saat kita mengurus akta kelahiran dan kita diberi tahu bahwa akan mendapat 3 buah dokumen

kependudukan yaitu 1 akta kelahiran 2. KK baru dan yang ke 3 KIA. Yang ini merupakan program three in One.



Gambar 1. Tempat Pelayanan Terpadu

Jadi dari 2 hasil wawancara ini memunculkan bahwa sistem penyampaian pesan kemasyarakat yang termasuk komunikasi masal. Komunikasi tentang pelayanan dokumen kependudukan ini juga penyampaian kepada masyarakat dilakukan oleh UPT Ciawi Bapak Hendra dengan memasang sepanduk di depan pelayanan tepatnya diatas teras depan pelayanan tapi pemasangannya sudah sangat lama sekali sehingga sudah

kelihatan rusak atau pudar beliau mengatakan bahwa "Pembuatan spanduk ini adalah inisiatif sendiri dan biaya sendiri."

Saluran komunikasi ini berjalan bersama sama dengan kebijakan pembentukan UPT yaitu membagi wilayah yang sangat luas ini dibanding dengan wilayah yang lain yang ada di Jabodetabek dengan memiliki persentase yang palig tinggi dibanding dengan wilayah lain.

Tabel 2. Luas Wilayah Perkotaan Jabodetabekpunjur

No.	Wilayah Administrasi	Luas (ha)	Persentase (%)
1	DKI Jakarta	64.113,97	9,08
2	Kota Bogor	11.159,17	1,58
3	Kota Depok	18.897,91	2,68
4	Kota Bekasi	21.718,80	3,08
5	Kota Tangerang	17.776,06	2,52
6	Kota Tangerang Selatan	16.502,39	2,34
7	Kabupaten Bogor	299.019,00	42,34
8	Kabupaten Tangerang	102.650,00	14,53
9	Kabupaten Bekasi	126.747,23	17,95
10	Kabupaten Cianjur	27.662,34	3,92
Total	Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur	706.246,87	100,00

Sumber: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR (2017).

Jika dilihat dari tabel 2 yang ditampilkan diatas yaitu diatas dengan

yang lain sebesar 42,34% atau 2 kali lipat dari kabupaten Bekasi dan 4 kali

dari DKI Jakarta.

3. Jangka waktu

Jangka Waktu dalam difusi inovasi ini merupakan sebuah proses proses keputusan dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima ataupun menolak. Jangka waktu merupakan hal yang paling berkaitan terhadap proses pengambilan keputusan. Keinovatifan seseorang dapat relatif lebih awal atau lebih lambat ketika menerima inovasi begitu juga ketika mengadopsi sebuah inovasi dalam sistem sosial

Dari definisi ini menunjukan gambaran waktu yang di pakai dalam mengirimkan inovasi penggunaan KIA dikalangan masyarakat yang mempunyai anak yang berumur 0 sampai 5 dan anak yang berumur 6 sampai 16 yang KIA-nya dilengkapi dengan foto membutuhkan waktu yang panjang dan dikalangan masyarakat rentan waktu ini tidak begitu jelas dan dikalangan pemerintah yang sebagai sumber penyedia layanan hanya menentukan target dan ini berdasarkan prioritas artinya setelah dokumen lain tercapai baru dokumen KIA ditargetkan. Hala ini dapat dilihat lagi dari hasil wawan cara diatas dengan Kasubag Pelayanan Disdukcapil (Adie Kurniawan) yang mengatakan, Target KIA tahun ini ditargetkan 60%, sedangkan pencapaian sampai bulan maret ini tahun 2024 baru mencapai 30,5%. Penggunaan jangka waktu yang di miliki masyarakat yang diberikan pemerintah khususnya Pemerintah daerah Kabupaten Bogor baru didominasi oleh target pencpaian. Masyarakat belum secara keseluruhan paham mengenai KIA dan KIA belum berdampak har yang penting dikalangan masyarakat hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan diatas yaitu Ibu Cici dan Bapak Iwan.

4. Sistem sosial

Sistem sosial merupakan tata tingkah

laku yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh masyarakat bagi seseorang yang mendukung posisi tertentu dalam lingkungan masyarakat. Sistem sosial merupakan hal yang sangat penting ketika kita memiliki maksud memecahkan masalah demi mencapai tujuan bersama. Sistem sosial ini juga menjadi sasaran bagi sebuah inovasi mereka dapat menerima maupun menolaksuautu inovasi tesebut.

Dari gambaran yang didapat melalui wawancara dengan narasumber dalam hal ini yaitu Disdukcapil Kabupaten Bogor yaitu Sesdukcapil Bapak Khaeruni Pelani mengatakan, "Terkaitan dengan jumlah penduduk, penduduk di Bogor sekitar 5,6 juta jiwa, oleh karena itu dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat & pendekatan pelayanan kita ada 7 UPT yang membawahi rata-rata tiap UPT 5-6 kecamatan, jumlah kecamatan ada 40 lebih. UPT ini memberikan layanan berkaitan dengan KIA akte kelahiran dan lain sebagainya. UPT memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin untuk lebih efisiensi masyarakat dalam rangka mengurus Adminduk di wilayah kabupaten Bogor."

Bapak Sekdis menambahkan, untuk sistem sosial yang menjadi sasaran adalah kita gencar akan mencetak umur dibawah 5 tahun, jadi kita sebar ke desa-desa (jadi tidak perlu menghadirkan yang bersangkutan). Sampai saat ini masih terus kita lakukan upaya untuk peningkatan tersebut agar bisa signifikan untuk mendongkrak presentase target tahun ini. Sekdis juga menambahkan, untuk mendukung keberhasilan ini, Kita juga mencoba bekerjasama dengan beberapa instansi atau merchant lainnya agar bisa dimanfaatkan dan menarik, seperti di tahun 2019, sempet kita dapat potongan dari taman safari, tempat wisata, rumah makan, dan juga bekerjasama dengan

Bank Jabar agar dijadikan sebagai dasar pembuatan rekening biar memacu anak-anak kecil.

KIA dimata masyarakat sehingga mendorong atau memotivasi masyarakat untuk memiliki atau untuk membuat KIA. Hal ini dapat di lihat dari karakteristik yang dimiliki oleh inovasi itu sendiri yang dalam hal ini adalah KIA. Ada empat (4) karakteristik menurut Everett yang harus dicapai pada keberhasilan inovasi, diantaranya:

1. Keuntungan Relatif (*Relative Advantage*)

Keunggulan relatif adalah sejauh mana suatu inovasi dianggap lebih baik dibandingkan dengan ide yang digantikannya (Everett, 1995), yang mana pada karakter pertama ini keunggulan relatif adalah tingkat sejauh mana suatu inovasi dipersepsikan lebih baik dibandingkan gagasan atau cara yang digantikannya

Pembuatan KIA ini di laksanakan melalui program *Three in One* Ini dilaksanakan pada saat masyarakat mendaftarkan untuk pembuatan akta kelahiran mereka akan langsung mendapatkan tiga dokumen kependudukan yaitu perbaikan KK, Akte Kelahiran dan KIA. Ini mereka terima tanpa terlebih dulu muncul kesadaran butuh dari dokumen ketiga.

2. Kesesuaian (*Compatibility*)

Kompatibilitas adalah tingkat sejauh mana suatu inovasi dianggap selaras dengan nilai-nilai, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan calon pengguna (Everett, R., 1995), jadi pada tahap ini akan menunjukan kesesuaian yaitu tingkat sejauh mana suatu inovasi dianggap selaras dengan nilai-nilai, pengalaman sebelumnya, dan kebutuhan calon penggunanya.

KIA yang mereka terima secara sadar itu dikarenakan langsung masyarakat terima pada saat mereka mengurus akte kelahiran mendapat penjelasan merupakan duplikat yang dapat dibawa

bawa kemana-mana dan dapat disimpan di dompet tapi penggunaanya atau manfaatnya masih tahap berkoodinasi dengan bidang terkait dengan kebutuhan pengguna atau pemegang kartu.

3. Kerumitan (*Complexity*)

Kompleksitas adalah tingkat sejauh mana suatu inovasi dianggap relatif sulit untuk dipahami dan digunakan (Everett, 1995). Pada fase ini Kerumitan adalah tingkat sejauh mana suatu inovasi dipersepsikan relatif sulit dipahami dan digunakan.

Dengan diterimanya secara langsung tanpa mengisi dan mendaftarkan pembuatan KIA dan dalam segi ukuran yang lebih kecil dan sederhana dibanding akta kelahiran maka tidak ada menyulitkan dalam bidang penyimpanan dan penempatannya.

4. Dapat diuji coba (*Trialability*)

Trialability (kemampuan untuk dicoba) adalah tingkat sejauh mana suatu inovasi dapat diuji coba secara terbatas (Everett, R., 1995). Kemungkinan untuk dicoba adalah tingkat sejauh mana suatu inovasi dapat diuji atau dicoba dalam skala terbatas sebelum diadopsi sepenuhnya.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Dukcapil masih tahap berkoodinasi dengan bidang terkait dalam hal pemanfaatannya bagi pemilik KIA hanya untuk bidang perlindungan anak dimata hukum dan kartu kenal terhadap identitas anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bogor ditinjau dari teori difusi inovasi belum menunjukkan proses adopsi yang optimal. Dari sisi karakteristik inovasi, KIA baru memberikan manfaat relatif sebagai dokumen yang lebih praktis dibandingkan akta kelahiran, namun belum dirasakan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dan pemanfaatannya masih terbatas sehingga keunggulan inovasi belum sepenuhnya dirasakan. Sementara itu, dari sisi elemen difusi inovasi, penyebaran KIA masih belum didukung oleh inovasi yang dikenal luas, saluran komunikasi yang efektif, kejelasan proses adopsi dalam jangka waktu tertentu, serta sistem sosial yang mampu mendorong kepemilikan secara berkelanjutan. Akibatnya, kepemilikan KIA umumnya terjadi sebagai pelengkap layanan *Three in One* saat pengurusan akta kelahiran, bukan karena kesadaran masyarakat akan manfaat KIA itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnold, R., Ahmed, F., Clarke, A., Quinn, N., Beenstock, J., & Holland, P. (2023). The relationship between parental adverse childhood experiences and the health, well-being and development outcomes of their children: A systematic review. *Public Health*, 219, 146-153. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2023.03.025>
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, dan Kuantitatif, dan Mix*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Everett, R. (1995). *Diffusion of Innovations/Everett Rogers*. <https://librarycentral.org.uk/5041129/7FE131/0R09Pw/diffusion-of-innovations-everett-m-rogers>
- Jonker, J. & Pennink, B. W. (2009). *The Essence of Research Methodology: A Concise Guide for Master and PhD Students in Management Science*. Berlin: Springer.
- Kim, B. (2025). Annual Research Review: Mapping the multifaceted approaches and impacts of adverse childhood experiences – an umbrella review of meta-analyses. *Journal of child Psychology and Psychiatry*, 66(4), 399–416. <https://doi.org/10.1111/jcpp.14022>
- Oral, R., Ramirez, M., Coohey, C., et al. (2016). Adverse childhood experiences and trauma informed care: The future of health care. *Pediatric Research*, 79(1), 227–233. <https://doi.org/10.1038/pr.2015.197>
- Racine, N., Deneault, A. A., Thiemann, R., Turgeon, J., Zhu, J., Cooke, J., & Madigan, S. (2023). Intergenerational transmission of parent adverse childhood experiences to child outcomes: A systematic review and meta-analysis. *Child Abuse & Neglect*, 106479. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106479>
- Strauss, A., & Corbin, J. (2013). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory*. Sage Publications.